

## Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025  
Hal. 291-299  
DOI: 10.58784/rapi.306

#### Olivianti Mentari Mandiangan

Corresponding author:  
[oliviantimandiangan064@student.unsrat.ac.id](mailto:oliviantimandiangan064@student.unsrat.ac.id)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

#### Jantje Janny Tinangon

Sam Ratulangi University  
Indonesia

#### Olivia Yulieta Megi

Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 13 March 2025

Revised 22 May 2025

Accepted 24 May 2025

Published 26 May 2025

#### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and evaluate the implementation of Government Accounting Standard Number 02 in the Budget Realization Report by the Social Service of Sangihe Islands Regency. This study utilizes both qualitative and quantitative data. Qualitative data refers to non-numerical information collected through focus group discussions, interviews, and observations. Meanwhile, quantitative data consists of measurable information that can be calculated and analyzed on a numerical scale. Since the Social Service does not generate income and does not carry forward SiLPA/SiKPA (surplus or deficit) in budget balance changes, it does not present revenue items in the Budget Realization Report. To further enhance the quality of financial information, human resource and financial management within the Social Service should be improved to ensure the ability to present financial reports in accordance with PSAP Number 02 on Budget Realization Reports and to complete the necessary items in the report.

Keywords: government accounting standards; budget realization report; budget realization report items; social service

JEL Classification: H83; G38

©2025 Olivianti Mentari Mandiangan, Jantje Janny Tinangon, Olivia Yulieta Megi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi merupakan pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konteks tersebut menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berperan sebagai instrumen utama dalam menyajikan

informasi mengenai pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, serta realisasinya dalam suatu periode anggaran tertentu. Agar menjamin keseragaman dan keandalan pelaporan, pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 02 yang secara khusus mengatur tentang penyusunan dan penyajian LRA.

Motivasi penelitian ini didasarkan pada pentingnya evaluasi terhadap penerapan SAP 02 di lingkungan instansi pemerintah daerah, khususnya pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai salah satu entitas pengguna anggaran. Sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial yang khas, keberhasilan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di Dinas Sosial tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran (Makaminang et al., 2022), tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang dilayani (Prabowo dan Palupiningtyas, 2024)

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017:1), akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:80) standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintah. Tanpa adanya standar tersebut, laporan yang dihasilkan akan berbeda-beda di setiap daerah dan akan menimbulkan permasalahan baru di tingkat nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang LRA, yaitu laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan semua aktivitas yang telah dianggarkan sebelumnya dengan realisasi yang terjadi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam suatu daerah tersebut. Standar ini dijadikan sebagai dasar penyajian LRA bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas laporan tersebut dapat diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan memuat banyak peraturan,

salah satunya terkait tentang laporan realisasi anggaran. Penelitian ini mengambil objek di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan yaitu mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pada bagian dan bidang Dinas, serta menyusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan (Bafagehi dan Ilat, 2022). Penyajian LRA pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerapkan sebagian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang LRA, namun, ada beberapa pos laporan realisasi anggaran pada kantor dinas sosial kabupaten kepulauan sangihe belum disajikan seperti penyajian laporan pada dana cadangan serta saldo sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran belum di pindahkan ke perubahan saldo anggaran.

## **2. Tinjauan pustaka**

### *Akuntansi*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) tentang pengertian akuntansi bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi, meringkas transaksi dan kejadian keuangan, menyajikan laporan, dan menginterpretasikan hasilnya. Menurut Weygandt (2018:3) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Menurut Hanggara (2019:1) pelaporan data atau informasi ekonomi yang membantu evaluasi dan pengambilan keputusan dikenal dengan istilah akuntansi. Akuntansi memiliki arti yang luas dalam arti meliputi pembuatan

berbagai teknik, Pencatatan interpretasi laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, cara melaporkan fakta-fakta usaha dan berbagai teknik untuk mengawasi seluruh jalanya kegiatan organisasi dari segi uang maupun kuantitas.

#### *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Menurut Sudaryo et al. (2017:33) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Tanjung (2013) SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD.

#### *Laporan Keuangan Daerah*

Menurut Hery (2016:3) laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan maupun pemerintahan dan kinerja perusahaan ataupun pemerintah daerah. Menurut Mahsun (2016:92) laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

#### *Laporan Realisasi Anggaran*

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal (55) Ayat 3, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Menurut Mahmudi (2010)

LRA menggambarkan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara atau daerah, terutama dalam hal pencapaian target pendapatan dan efisiensi penggunaan belanja negara. Menurut Bastian (2014), tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung penerapan standar tersebut.

#### *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02, isi Laporan Realisasi Anggaran yaitu Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

### **3. Metode riset**

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif. Menurut Marwadani (2020:3) Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif penelitian ini menganalisis serta mendeskripsikan hasil dalam bentuk tulisan maupun gambar mengenai LRA sesuai dengan fakta yang diperoleh dari sumber data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan

Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data non-numerik yang jenis datanya dapat dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan melakukan fokus grup. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Sekretariat, salah satu pegawai, serta kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan. Serta Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik bentuk tulisan, gambar atau foto dengan melihat secara langsung LRA yang ada pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Proses analisis terdiri dari prosedur sistematis yang didasarkan pada logika dan bukan hanya keyakinan (Budiarso dan Pontoh, 2025). Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian kemudian membandingkan dengan PSAP No 02. Komponen yang dianalisis adalah prosedur penyusunan, periode pelaporan, dan isi laporan LRA. Setelah dianalisis diambil Kesimpulan dan saran.

#### **4. Hasil dan pembahasan**

##### **Hasil**

##### *Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe*

Penyusunan LRA pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan dengan cara menetapkan Kasubag Keuangan pada saat proses penyusunan laporan sehingga telah menerapkan klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi yang ditetapkan dalam dokumen yang sesuai dengan PSAP Nomor 02. Pada saat penyusunan laporan realisasi anggaran

kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan analisis atas laporan realisasi. jika terdapat selisih rekapan pengeluaran anggaran maka ada kesesuaian dengan pengeluaran anggaran yang telah dicairkan. Hal ini menyebabkan pelaporan keuangan harus disesuaikan sehingga bisa dilaporkan ke badan keuangan daerah (BKD).

Penyusunan laporan keuangan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan basis kas. Proses penyusunan LRA menggunakan aplikasi software SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan FMIS (*Financial Management Information System*) sistem pencatatan yang dilakukan berbasis kas menuju akrual sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 sehingga dalam penyusunan laporan keuangan dapat dikerjakan lebih baik dan efektif serta membantu mengurangi biaya operasional dan memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang profil entitas audit.

##### *Periode pelaporan*

Penyusunan LRA Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menggunakan acuan basis sesuai dengan PSAP Nomor 02, yang harus disajikan selambat-lambatnya 6 bulan dalam setahun. Tetapi untuk realisasi kegiatan Kantor Dinas Sosial dilakukan setiap bulan dengan mencatat jumlah anggaran serta kegiatan yang sudah terealisasikan agar anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikontrol sebaik mungkin. Pengungkapan informasi ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan memberikan pemahaman yang jelas kepada pengguna laporan mengenai kondisi khusus yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut agar manfaat LRA bisa disajikan tepat waktu.

##### *Isi Laporan Realisasi Anggaran*

Struktur LRA pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan bahwa data dalam

Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan anggarannya untuk masing-masing hal berikut: Pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit. Laporan Realisasi Anggaran menyortir beberapa komponen yang meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, Dan Silpa/Sikpa yang diperlukan untuk pembiayaan yang tepat. LRA pada Dinas Sosial sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasional, belanja modal dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja Operasional diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

### **Pembahasan**

#### *Prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe*

Penyusunan LRA di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerapkan klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi yang ditetapkan dalam dokumen yang sesuai dengan PSAP nomor 02. Penyusunan LRA menggunakan basis kas dan telah menggunakan aplikasi *software* SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan FMIS (*Financial Management Information System*). Proses penyusunan laporan keuangan telah dikerjakan lebih baik dan efektif dengan menggunakan aplikasi *software* tersebut. Selain itu telah diterapkan klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi yang ditetapkan dalam dokumen yang sesuai dengan PSAP nomor 02 dan sebelum melakukan finalisasi pelaporan realisasi anggaran, akan diadakan rekonsiliasi pada Badan Keuangan di bagian Akuntansi yang dilakukan secara manual maupun menggunakan *software* aplikasi SIPD dan FMIS.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anto et al. (2021) menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan dan *Microsoft Excel* yang membantu pengelolaan data keuangan pemerintah daerah.

#### *Periode pelaporan*

Berdasarkan periode pelaporan yang dilakukan LRA harus disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pada situasi tertentu, tanggal laporan dapat berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan dapat disajikan dengan periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun. Dengan tujuan LRA menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran, memberikan pemahaman yang jelas kepada pengguna laporan mengenai kondisi khusus yang mempengaruhi laporan keuangan serta meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap anggaran kegiatan. Adapun manfaat Laporan

Realisasi anggaran dapat disajikan tepat waktu, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Paputungan et al. (2023) Laporan Realisasi Anggaran disajikan minimal setahun sekali. Sekali Waktu, tanggal perincian elemen diubah dan laporan pelaksanaan rencana keuangan Tahunan diperkenalkan untuk jangka waktu lebih dari atau kurang dari satu tahun. Laporan yang dibuat disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Anggaran disajikan dua kali dalam setahun, masing-masing dalam laporan tengah tahunan dan laporan tahunan.

#### *Isi Laporan Realisasi Anggaran*

Struktur LRA pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe dibuat dengan membandingkan anggaran masing-

masing komponen, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Dan Surplus/Defisit. LRA meliputi beberapa komponen, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, Dan SiLPA/SiKPA. LRA Dinas Sosial sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasional dan Belanja Modal. Namun Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak memindahkan SiLPA/SiKPA ke perubahan saldo anggaran, tidak menyusun laporan perubahan saldo anggaran dan tidak mengelola penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) karena merupakan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di laksanakan oleh Nindy (2023) memaparkan tiga dari enam pos

sejalan dengan PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pos-pos yang tidak Disajikan antara lain pos transfer, surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Pos transfer tidak disajikan sebab transfer yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak Berupa uang, pos surplus/defisit tidak disajikan dalam LRA, tetapi disajikan dalam Laporan Operasional dan pos silpa/sikpa tidak disajikan karena bila terdapat silpa/sikpa akan langsung dikembalikan ke kas negara.

**Tabel 1. Indikator Perbandingan Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 2010**

| Indikator                                    | Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 02 Tahun 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keterangan |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Penyajian informasi realisasi LRA            | Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sesuai     |
| Pengidentifiasian LRA                        | PSAP N0. 02 Laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya</li> <li>- Cakupan entitas pelaporan</li> <li>- Periode yang dicakup</li> <li>- Mata uang pelaporan</li> <li>- Satuan angka yang digunakan</li> </ul> | Laporan realisasi anggaran di Kantor Dinas Sosial sudah diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap nomor halaman laporan, informasinya mencakup <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya</li> <li>- Cakupan entitas pelaporan</li> <li>- Periode yang dicakup</li> <li>- Mata uang pelaporan</li> <li>- Satuan angka yang digunakan</li> </ul> | Sesuai     |
| Periode pelaporan                            | PSAP Nomor 02 Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laporan realisasi anggaran di kantor Dinas Sosial telah disajikan sekali dalam setahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sesuai     |
| Ketepatan waktu penyajian                    | PSAP N0. 02 Entitas menyajikan laporan realisasi anggaran selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Di Kantor Dinas telah disajikan setiap 6 bulan dalam setahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sesuai     |
| Penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | PSAP Nomor 02 laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan-LRA</li> <li>- Belanja</li> <li>- Transfer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mencakup pos-pos sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja</li> <li>- Transfer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | Sesuai     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surplus/defisit-LRA</li> <li>- Pengeluaran pembiayaan</li> <li>- Penerimaan pembiayaan</li> <li>- Pembiayaan netto</li> <li>- Sisalebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surplus/defisit-LRA</li> <li>- Pengeluaran pembiayaan</li> <li>- Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)</li> </ul>                       |              |
| Penyelenggaraan akuntansi anggaran | PSAP Nomor 02 Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.                                                                                        | Akuntansi Anggaran pada Kantor Dinas telah diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran belanja pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan                     | Sesuai       |
| Pengakuan                          | PSAP Nomor 02 Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan                                                                                                                                            | Pengakuan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak disajikan                                                                           | Tidak sesuai |
| Pengukuran                         | Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.                                                                                                | Belanja pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe telah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum dan dikeluarkan melalui bendahara                            | Sesuai       |
| Penyajian anggaran belanja         | PSAP Nomor 02 Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran                                                                                                                                                                 | Pengukuran realisasi anggarannya telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasi dalam dokumen anggaran                                                                                             | Sesuai       |
| Penyajian dan pengakuan            | PSAP Nomor 02 Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. PSAP Nomor 02 Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga | Belanja disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja Operasional, Belanja Modal dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan | Sesuai       |
| Penyajian                          | PSAP Nomor 02 Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial                         | Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Belanja Operasi diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.                                                          | Sesuai       |
| Penyajian dan pengakuan            | PSAP Nomor 02 Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud     | Belanja modal menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.                       | Sesuai       |
| Pengakuan                          | Pembentukan Dana Cadangan, hasil-hasil yang diperoleh dari dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah                                                                                         | Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak memiliki Dana Cadangan                                                                                                                   | Sesuai       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Penyajian SiLPA/SiKPA     | PSAP Nomor 02 sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada akhir periode dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.                                                                       | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. | Tidak sesuai |
| Penyajian Surplus/Defisit | PSAP Nomor 02 Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu Periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA                                                                                       | Surplus/Defisit-LRA di Kantor Dinas Sosial merupakan selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan                                          | Sesuai       |
| Penyajian                 | PSAP Nomor 02 Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan LRA dan Belanja serta Penerimaan dan Pengeluaran, serta Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA | Kantor Dinas Sosial akan selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA jika terdapat selisih              | Sesuai       |

Sumber: Data olahan, 2024

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah terkumpul data dan informasikemudian di analisis mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat secara keseluruhan bahwa penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai baik dan sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penerapan penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kantor Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah menyajikan unsur-unsur laporan Realisasi Anggaran. Namun masih terdapat beberapa masalah seperti Dana Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran.

## Daftar pustaka

- Anto, L. O., Awaluddin, I., & Suwarno, T. E. (2021). Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset & Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 6(2), 180-196. <http://dx.doi.org/10.33772/jak-uho.v6i2.22225>
- Bafagehi, S., & Ilat, V. (2022). Analisis penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan standar akuntansi pemerintah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(2), 71-80. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/49358>
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Budiarso, N. S., & Pontoh, W. (2025). *Metode riset kuantitatif dalam ilmu sosial*. Yayasan Widayantara Nawasena Raharja.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. Inmedia.
- Hanggara, A. (2019). *Pengantar akuntansi*. CV Jakad Publishing.

- Hery. (2016). *Analisis laporan keuangan*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Makaminang, N. E., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2022). Evaluasi efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 325-334. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42162>.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2016). *Akuntansi sektor public*. Edisi ketiga. BPFE-Yogyakarta.
- Marwadani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif: Teori dasar dan analisis data dalam prespektif kualitatif*. Deepublish.
- Mardiasmo. (2018). *Sektor publik*. Andi.
- Paputungan, N. C., Manossoh, H., & Rondonuwu, S. (2023). Analisis penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pada kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 192-201. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/51483>
- Prabowo, A. G., & Palupiningtyas, D. (2024). Analisis strategi pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (2024). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 73-81. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.1906>
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02: Laporan Realisasi Anggaran*. Pemerintah Indonesia.
- Sudiaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di era otonomi daerah*. Andi Offset.
- Tanjung, A. H. (2013). *Akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual*. Cetakan kedua. Alfabeta.
- Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2018). *Financial accounting: IFRS edition*. Wiley.